

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Taliban merupakan salah satu gerakan Islam mujahidin yang pernah memimpin Afghanistan pada tahun 1996–2001 dan kemudian kembali berkuasa pada tahun 2021. Dalam literatur hubungan internasional dan politik Timur Tengah, Taliban sering diposisikan sebagai aktor non-negara yang bertransformasi menjadi rezim de facto yang menguasai suatu negara dan mengendalikan seluruh instrumen kekuasaan politik. Pada awal kemunculannya sekitar tahun 1994, banyak pengamat, terutama di Barat, belum melihat Taliban sebagai entitas politik yang signifikan dalam konfigurasi kekuasaan regional. Namun, pasca peristiwa serangan 11 September 2001 dan invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, Taliban menjelma menjadi salah satu aktor paling penting dalam dinamika keamanan global, perang melawan terorisme, dan studi mengenai radikalisme transnasional.¹

Secara terminologis, istilah "Taliban" berasal dari bahasa Pashto yang berarti "para penuntut ilmu" atau "para pelajar". Istilah ini merefleksikan latar sosial sebagian besar anggota awal Taliban yang berasal dari jaringan madrasah di Pakistan dan Afghanistan selatan, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi keagamaan mazhab Hanafi dan gerakan keulamaan Deobandi. Gerakan Deobandi sendiri menekankan purifikasi ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap bid'ah serta penolakan terhadap pengaruh budaya dan politik

¹ Durrotun Nafisah, 'Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban 1996-2001 M', *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019, p. 49.

Barat. Dalam perkembangan historisnya, kelompok pelajar ini tidak hanya menjadi komunitas religius, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan militer-politik yang mengklaim diri sebagai pelindung kemurnian syariat Islam dan penjaga keamanan Afghanistan.

Konteks sosial-politik kelahiran Taliban tidak dapat dilepaskan dari pengalaman panjang perang dan intervensi asing di Afghanistan. Invasi Uni Soviet tahun 1979, perang perlawanan Mujahidin sepanjang dekade 1980-an, serta konflik antar faksi setelah tumbangannya rezim Najibullah pada awal 1990-an, telah meninggalkan negara yang hancur secara institusional, ekonominya runtuh, dan masyarakatnya lelah oleh perang. Larry P. Goodson menggambarkan Afghanistan pada periode ini sebagai "perang tanpa akhir" yang ditandai oleh kegagalan negara, fragmentasi otoritas, dan meningkatnya peran para panglima perang lokal yang memonopoli kekerasan demi kepentingan faksional.² Di tengah kekacauan tersebut, Taliban menawarkan janji stabilitas, penegakan hukum yang tegas berbasis syariat, dan pengakhiran perang saudara.³

Sejak menguasai Kabul pada tahun 1996, Taliban membentuk pemerintahan yang bercorak teokratik dengan interpretasi Islam yang sangat konservatif. Sejumlah studi menyoroti bahwa kebijakan domestik Taliban pada era pertama ditandai oleh represi sosial, terutama terhadap perempuan, serta pembatasan menyeluruh terhadap kebebasan sipil. Goodson menegaskan bahwa rezim Taliban menerapkan serangkaian kebijakan yang mengeluarkan perempuan dari ruang publik: melarang mereka bekerja di sektor formal, membatasi akses mereka terhadap pendidikan, serta mewajibkan aturan berpakaian yang

² GondaYumitro, 'Pengaruh Ideologi Taliban Terhadap Dinamika Konflik Afghanistan', *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9, No 3 (2023), pp. 802–12.

³ Goodson Larry P, *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban* (University of Washington Press, 2001).

ketat.⁴ Kebijakan-kebijakan ini disertai dengan penerapan hukum hudud secara keras, seperti hukuman amputasi, rajam, dan eksekusi publik yang dipertontonkan di lapangan umum, dengan dalih penegakan syariat. William Maley juga menunjukkan bagaimana rezim tersebut menggabungkan struktur keagamaan dengan militerisme sehingga negara dijalankan oleh elite religius yang memonopoli interpretasi hukum Islam dan mengesampingkan mekanisme representasi politik.⁵ Sebagai sebuah kelompok yang mengusung paham Islam yang keras, Taliban sebagai kelompok Islam yang berhaluan keras sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai profetik Nabi Muhammad yang mengajarkan *Rahmatan lil alamin*,⁶ sehingga kelompok ini seringkali dikategorikan sebagai organisasi Islam radikal.

Selain represi domestik, pemerintahan Taliban pertama juga dikenal dengan orientasi politik luar negeri yang isolasionis. Ahmed Rashid menjelaskan bahwa Taliban menjalin hubungan yang sangat terbatas dengan komunitas internasional; hanya beberapa negara seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memberikan pengakuan resmi terhadap pemerintahan mereka.⁷ Taliban dicurigai memberikan perlindungan kepada jaringan jihad transnasional, terutama Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Hubungan simbiotik antara Taliban dan Al-Qaeda inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama intervensi militer Amerika Serikat dan sekutunya ke Afghanistan setelah serangan 11 September 2001. Laporan Komisi 9/11 menyatakan bahwa keberadaan kamp pelatihan Al-Qaeda di wilayah yang dikuasai Taliban memungkinkan terjadinya koordinasi

⁴ P, *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban*.

⁵ William Maley, *Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban* (New York University Press, 1998).

⁶ Lukman, 'Tafsir Ayat Rahmatan Lil'alamin Menurut Penafsir Ahlu Sunnah, Muktazilah, Syiah, Dan Wahabi', *Millah*, 15 (2016), pp. 227–48.

⁷ Gonda Yumitro, 'Pengaruh Ideologi Taliban Terhadap Dinamika Konflik Afghanistan'.

operasi teror berskala global.⁸ Sejak saat itu, Taliban diposisikan dalam wacana global sebagai bagian dari ancaman keamanan internasional.

Runtuhnya pemerintahan Taliban pada tahun 2001 tidak serta-merta mengakhiri eksistensi mereka sebagai aktor politik dan militer. Justru, Taliban bertransformasi menjadi gerakan insurgensi yang melakukan perang gerilya melawan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat dan pasukan koalisi internasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa selama dua dekade berikutnya, Taliban membangun kembali jaringan kekuatan di tingkat lokal, memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap korupsi, ketidakadilan, dan kegagalan institusi negara pasca-2001. Antonio Giustozzi, misalnya, menggambarkan bagaimana Taliban memadukan strategi militer, politik, dan religius untuk mengonsolidasikan kembali pengaruh mereka, terutama di wilayah pedesaan yang terpinggirkan dan kurang tersentuh oleh proyek nation-building Barat.⁹ Penarikan pasukan internasional secara bertahap dan melemahnya legitimasi pemerintah Kabul memberi ruang bagi Taliban untuk mengisi kekosongan otoritas di banyak provinsi.

Klimaks dari proses kebangkitan tersebut terjadi pada Agustus 2021 ketika Taliban kembali menguasai Kabul setelah penarikan penuh pasukan Amerika Serikat dan NATO. Peristiwa ini memunculkan perdebatan baru mengenai karakter Taliban generasi kedua atau yang sering disebut sebagai "Taliban 2.0". Di satu sisi, Taliban berupaya menampilkan citra yang lebih moderat dan pragmatis, misalnya dengan memberikan pernyataan di media internasional bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan dalam batas syariat, membuka diri terhadap bantuan internasional, serta berkomitmen mencegah penggunaan

⁸ National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 'The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States' (Government Printing Office, 2004).

⁹ Antonio Giustozzi, *The Taliban at War, 2001--2018* (Hurst & Company, 2019).

wilayah Afghanistan sebagai basis teror global. Di sisi lain, berbagai laporan dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) menunjukkan bahwa praktik di lapangan sering kali tidak jauh berbeda dengan pola represif era pertama.¹⁰

Menurut ahli teologi Islam di Universitas al-Azhar, Kairo, Mohamad Mohaq, haluan Taliban tidak disusun untuk kemaslahatan bersama “Mereka adalah kelompok teroris, bukan sebuah organisasi politik yang bekerja demi kepentingan masyarakat,” kata Mohamad Mohaq yang telah diwawancarai oleh seorang jurnalis¹¹. Ini dapat dibuktikan sanksi mereka yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia seperti eksekusi umum terhadap terpidana atas pembunuhan dan pezina, hukuman amputasi tangan untuk mereka atas pencurian. Laporan Human Rights Watch tahun 2022, misalnya, mendokumentasikan pembatasan ketat terhadap pendidikan perempuan, terutama di tingkat menengah dan tinggi, pelarangan perempuan bekerja di sejumlah sektor, serta berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis masyarakat sipil.¹² Amnesty International juga menegaskan adanya pola pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan tindakan represif terhadap protes damai.¹³ Sementara itu, laporan UNAMA menggarisbawahi bahwa meskipun Taliban mengklaim akan menghormati hak-hak dasar masyarakat, kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan justru mempersempit ruang kebebasan berpendapat, berorganisasi,

¹⁰ United Nations Assistance Mission in Afghanistan, ‘Report on the Situation of Human Rights in Afghanistan’, 2022 <<https://unama.unmissions.org>>.

¹¹ Waslat Hasrat-Nazimi, ‘Perempuan Afganistan Dalam Jerat Misoginisme Politik Taliban’, *Taliban Memberangus Satu per Satu Hak Kaum Perempuan Di Afganistan. Kebijakan Radikal Penguasa Kabul Diyakini Digerakkan Oleh Tradisi Pashtun Dan Bermotifkan Politik Demi Mempertahankan Kekuasaan* <<https://www.dw.com/id/perempuan-afganistan-era-taliban/a-64246678>>.

¹² Human Rights Watch, *Afghanistan: Year of Taliban Rule --- Repression of Women, Girls, Media, and Dissent* (2022).

¹³ Amnesty International, ‘Afghanistan: One Year of Taliban Repression’, 2022.

dan beragama.¹⁴ Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kontinuitas kuat dalam pola otoritarianisme sosial Taliban dari era pertama ke era kedua.

Di saat yang sama, Taliban mencoba bersikap lebih fleksibel dalam kebijakan luar negeri. Berbeda dengan isolasionisme ekstrem pada akhir 1990-an, Taliban 2.0 menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Tiongkok, Iran, Turki, dan negara-negara Asia Tengah. International Crisis Group mencatat bahwa Taliban berupaya memanfaatkan posisi geografis Afghanistan yang strategis untuk menarik investasi dan bantuan ekonomi, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur.¹⁵ Sejumlah laporan juga menyebut adanya kontrak kerja sama ekonomi berskala besar dengan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok dan negara lain, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan. Secara formal, Taliban juga berpartisipasi dalam forum-forum regional, meski belum memperoleh pengakuan luas sebagai pemerintah sah Afghanistan.

Sejumlah laporan juga menyebut adanya kontrak kerja sama ekonomi berskala besar dengan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok dan negara lain, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan.¹⁶ Secara formal, Taliban juga berpartisipasi dalam forum-forum regional, meski belum memperoleh pengakuan luas sebagai pemerintah sah Afghanistan

¹⁴ United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 'Annual Report on Afghanistan 2021-2023', 2023 <<https://unama.unmissions.org>>.

¹⁵ International Crisis Group, 'The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy in Afghanistan', 2024 <<https://www.crisisgroup.org>>.

¹⁶ S Iqbal, 'Comparative Analysis of Taliban Regimes to Assess the Global Challenges in Afghanistan: A Realist Perspective', *Global Foreign Policy Review*, 4.2 (2023), pp. 43–59 <<https://www.gfprjournal.com/article/comparative-analysis-of-taliban-regimes-to-assess-the-global-challenges-in-afghanistan-a-realist-perspective>>.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana Taliban pada era kedua benar-benar berbeda dari Taliban era pertama? Apakah terjadi transformasi substantif dalam ideologi, struktur kekuasaan, dan kebijakan politik mereka, ataukah perubahan yang tampak hanyalah kosmetik yang bertujuan menyesuaikan diri dengan tuntutan internasional? Sebagian analis berargumen bahwa Taliban 2.0 telah belajar dari pengalaman masa lalu dan menyadari pentingnya pengelolaan negara yang lebih pragmatis, terutama dalam aspek ekonomi dan diplomasi. Iqbal, misalnya, menunjukkan bahwa Taliban berusaha menyeimbangkan antara komitmen ideologis dan kebutuhan realistis untuk menjaga hubungan dengan kekuatan eksternal dan mengelola tekanan sanksi.¹³ Namun, banyak kajian lain menilai bahwa ideologi dasar dan pola kekuasaan Taliban tetap sama: patriarkis, eksklusif, dan berbasis pada interpretasi tunggal atas syariat, dengan ruang partisipasi yang sangat terbatas bagi kelompok-kelompok di luar lingkaran inti mereka.¹⁷

Dari perspektif hubungan internasional, fenomena ini memiliki signifikansi yang besar. Pertama, Afghanistan di bawah Taliban kembali menjadi arena pertemuan kepentingan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, serta aktor regional lain seperti Pakistan, Iran, dan India. Posisi geopolitik Afghanistan yang strategis di antara Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah menjadikan kebijakan Taliban berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan. Kedua, dinamika kebijakan Taliban berpengaruh pada isu-isu global seperti terorisme transnasional, arus pengungsi, perdagangan narkoba, dan hak asasi manusia. Produksi opium dan metamfetamin, misalnya, menjadi salah satu sumber pendanaan penting yang dikaitkan dengan jaringan ekonomi informal di bawah kendali atau toleransi Taliban. Ketiga, kebangkitan Taliban

¹⁷ William Maley, *Taliban Dan Multi Konflik Di Afghanistan* (Pustaka Al-Kautsar, 1999).

menantang wacana mengenai efektivitas intervensi internasional dan proyek pembangunan demokrasi yang selama dua dekade menjadi agenda besar di Afghanistan.¹⁸ Ketiga, kebangkitan Taliban menantang wacana mengenai efektivitas intervensi internasional dan proyek pembangunan demokrasi yang selama dua dekade menjadi agenda besar di Afghanistan.

Dalam konteks kajian akademik, sudah banyak penelitian yang membahas Taliban, baik dari sisi sejarah, ideologi, maupun kebijakan domestik mereka. Goodson, Rashid, Maley, dan sejumlah sarjana lain, memberikan gambaran mendalam tentang karakter pemerintahan Taliban pada era pertama, termasuk hubungan mereka dengan jaringan jihad internasional serta dampak kebijakan represif terhadap masyarakat sipil.¹⁹ Di tingkat nasional, terdapat pula skripsi dan penelitian yang menelaah dinamika politik Afghanistan di bawah Taliban, fokus pada konflik ideologi Islam–Komunisme sebelum Taliban, atau analisis atas kebijakan internal pemerintahan Taliban 1996–2001. Al-Ghifari, misalnya, mengkaji dinamika politik Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban dengan menekankan faktor ideologi dan dampaknya terhadap struktur kekuasaan. Rokhman menyoroti kebijakan politik dalam negeri Taliban dan implikasinya terhadap stabilitas domestik.²⁰

Namun, mayoritas kajian tersebut cenderung menempatkan fokus pada salah satu periode saja, terutama era pertama, atau melihat Taliban pasca-2001 semata sebagai gerakan insurgensi, bukan sebagai pemerintahan yang kembali berkuasa. Kajian yang

¹⁸ UNODC, 'Afghanistan Opium Survey 2024', 2024 <<https://www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html>>.

¹⁹ Griff Witte, *Afghanistan War*, 2025 <<https://www.britannica.com/event/Afghanistan-War>>.

²⁰ Al-Ghifari Ahda Abid, 'Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)', *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

secara eksplisit membandingkan dua periode kekuasaan Taliban sebelum dan sesudah 2021 masih relatif terbatas, apalagi yang menggunakan pendekatan perbandingan politik secara sistematis. Di sisi lain, beberapa penelitian terbaru mula.²¹

Membahas Taliban sebagai rezim yang tengah membangun proyek pemerintahan (governance project), tetapi belum banyak yang memeriksa secara rinci kontinuitas dan transformasi kebijakan lintas dua era kekuasaan.²² Padahal, perbandingan lintas waktu ini penting untuk memahami apakah Taliban mengalami transformasi sebagai rezim politik atau justru mempertahankan pola lama dengan sekadar menyesuaikan strategi komunikasi dan diplomasi.²³

Sebagian diskursus publik dan media cenderung membingkai Taliban 2.0 sebagai versi yang lebih moderat hanya karena mereka kini berbicara dengan bahasa diplomasi dan memanfaatkan media sosial untuk membangun citra baru.²⁴ Narasi ini berpotensi menutupi fakta bahwa kebijakan-kebijakan inti yang menyangkut hak-hak perempuan, kebebasan sipil, dan struktur kekuasaan internal justru menunjukkan banyak kesinambungan dengan era sebelumnya. Laporan-laporan dari Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan bahwa sejak Taliban kembali berkuasa, lebih dari 80 persen media independen di Afghanistan berhenti beroperasi dan puluhan jurnalis mengalami intimidasi maupun kekerasan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun Taliban menggunakan kanal media untuk memoles citra, substansi pengaturan terhadap kebebasan pers tetap represif.²⁵

²¹ Farhan Juneth Paisuly, 'Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan', *PATTIMURA Law Study Review*, Vol 1 No 1 (2023).

²² Hans J Morgenthau, *Politics Among Nations* (Alfred A. Knopf, 1967).

²³ Sophiana Widiastutie, 'Hubungan Cina-Rusia Dalam Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tengah', *Journal of Political Issues*, Volume 5, (2024).

²⁴ Ali Ma'ruf M. Nur Rokhman, 'Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban Di Afghanistan (1996-2001)', *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2015.

²⁵ Maley, *Taliban Dan Multi Konflik Di Afghanistan*.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk menempatkan Taliban bukan hanya sebagai fenomena keamanan atau ekstremisme semata, melainkan sebagai rezim politik yang memiliki kebijakan, institusi, dan strategi tertentu dalam mempertahankan kekuasaan. Pendekatan perbandingan politik memberikan perangkat analitis untuk melihat Taliban 1.0 dan Taliban 2.0 sebagai dua periode pemerintahan dalam satu rezim yang relatif serupa, tetapi beroperasi dalam konteks domestik dan internasional yang berbeda. Dengan demikian, analisis dapat diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti: variabel apa yang tetap konsisten dalam ideologi dan struktur kekuasaan Taliban, dan di mana letak transformasi yang terjadi? Bagaimana tekanan internal seperti resistensi masyarakat dan dinamika etnis serta tekanan eksternal seperti sanksi internasional dan kebutuhan akan bantuan ekonomi memengaruhi pilihan kebijakan Taliban di kedua era tersebut?.

Dari sisi praktis, kajian ini memiliki relevansi bagi pembuat kebijakan, organisasi internasional, dan masyarakat global yang berkepentingan dengan stabilitas Afghanistan dan kawasan sekitarnya. Memahami pola kesinambungan dan perubahan kebijakan Taliban dapat membantu merumuskan strategi diplomasi, bantuan kemanusiaan, serta pendekatan hak asasi manusia yang lebih realistis. Alih-alih hanya berangkat dari asumsi bahwa Taliban telah berubah atau sebaliknya sepenuhnya sama, analisis komparatif yang berbasis data dan literatur memungkinkan penilaian yang lebih proporsional terhadap karakter rezim ini. Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian yang secara khusus membandingkan Taliban 1.0 (1996–2001) dan Taliban 2.0 (2021–sekarang) dalam kerangka hubungan internasional dan perbandingan politik. Penelitian ini akan berfokus pada analisis kesinambungan dan transformasi dalam aspek ideologi, struktur kekuasaan, serta kebijakan politik dan sosial

yang diterapkan pada dua periode tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakter rezim Taliban sebagai aktor politik kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai rezim non-negara, konflik, dan transformasi politik di negara-negara yang mengalami perang berkepanjangan.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk konsistensi dan transformasi yang terjadi pada pemerintahan Taliban antara Era pertama (1996–2001) dan Era kedua (2021–sekarang)?.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : Menjelaskan bagaimana perbandingan taliban antara pemerintahan taliban pertama pada tahun 1996 – 2001 dan kedua pada tahun 2021 – sampai sekarang di afghanistan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang studi hubungan internasional, khususnya mengenai dinamika kebijakan rezim non-negara dan aktor internasional dalam konteks negara yang berkonflik. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai politik Timur Tengah dan

Asia Selatan, serta memberikan perspektif baru dalam memahami perubahan kebijakan kelompok islamis yang sebelumnya radikal, dengan menekankan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi transformasi kebijakan mereka dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi analisis perbandingan kebijakan antara kekuasaan dalam konteks konflik dan transisi kekuasaan di negara yang memiliki sejarah panjang dalam pergolakan politik.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan internasional, khususnya dalam merumuskan strategi diplomasi dan pendekatan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Dengan memahami perbedaan dan persamaan kebijakan antara kedua periode pemerintahan Taliban, aktor internasional seperti pemerintah, organisasi internasional, dan LSM dapat lebih efektif dalam bernegosiasi dengan pemerintah Taliban saat ini, baik dalam isu hak asasi manusia, keamanan, maupun pembangunan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional dan media dalam memahami kompleksitas situasi politik di Afghanistan dan dampak kebijakan Taliban terhadap stabilitas regional.

1.4 Penelitian Terdahulu

1.4.1 Studi tentang Taliban Pertama (1996-2001)

Penelitian mengenai Taliban pada era pertama banyak berfokus pada karakter ideologi, kebijakan domestik, serta struktur kekuasaan mereka. Goodson (2001), dalam bukunya *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban*²⁶, menekankan bahwa kebijakan Taliban pada periode tersebut didominasi oleh penerapan syariah yang konservatif, kontrol sosial yang ketat, serta pembatasan terhadap perempuan dalam ruang publik. Sementara itu, Ahmed Rashid (2000) dalam karyanya *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*,²⁷ memberikan analisis lebih mendalam mengenai jaringan politik, hubungan eksternal Taliban, dan peran aktor regional dalam menguatkan kekuasaan mereka. Kedua penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang fondasi ideologi dan karakter pemerintahan Taliban, namun tidak mengkaji secara spesifik transformasi kebijakan lintas periode kekuasaan.

Penelitian lain terkait Taliban biasanya memusatkan perhatian pada kondisi sosial-politik Afghanistan yang melahirkan kelompok tersebut. Skripsi yang berjudul “*Dinamika Politik Afghanistan pada Masa Pemerintahan Taliban*” karya Al-Ghifari Ahda Abid²⁸, Mahasiswa dari Universitas Negeri Jogjakarta, menelaah pertentangan ideologi Islam dan Komunisme pada masa perang Soviet, serta bagaimana kondisi tersebut menciptakan ruang bagi kemunculan Taliban sebagai

²⁶ P, *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban*.

²⁷ Ahmed Rashid, *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, English La (Yale Nota Bene Books, 2001).

²⁸ Al-Ghifari Ahda Abid, ‘*Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)*’.

kekuatan politik baru. Karya ini memberikan konteks historis yang penting, tetapi tidak membahas perkembangan Taliban setelah era pasca-2001. Rokhman (2020) menyoroti dinamika represi sosial dan pembentukan aturan-aturan ketat pada masa pemerintahan Taliban, namun analisis tersebut tetap terbatas pada periode awal kekuasaan mereka. Dan dari penelitian tersebut bisa peneliti simpulkan sebagai berikut:

(1) Konfisi politik afghanistan sebelum berkuasanya Taliban merupakan sebuah proses pergulatan antara ideologi Islam dan Komunis yang direpresentasikan oleh peristiwa Invasi Uni Soviet yang telah memicu perlawanan para Mujahidin (Pejuang Islam) Afghanistan. (2) Perlawanan Islam di Afghanistan memunculkan sebuah kelompok baru dalam perjalanan sejarah Afghanistan Modern, yakni Mujahidin. Tetapi ketika Negara Afghanistan dipimpin oleh para Mujahidin terjadi ketidakstabilan politik yang disebabkan perang internal dalam tubuh kelompok mujahidin itu sendiri.

Dan yang ketiga, Sebuah Gerakan Islam yang berasal dari Madrasah-Madrasah Islam di sekitar provinsi Kandahar, yang disebut Taliban, yang lahir untuk meredakan konflik dan sebab-akibat kriminalitas yang ditimbulkan oleh masalah internal didalam kelompok Mujahidin. Taliban memberikan penawaran posisi dinamika politik yang lebih radikal dan ekstrem dibandingkan pemerintahan Mujahidin yang sukses digantikannya (4) Taliban menegakkan sebuah Pemerintahan Islam dan menjadikan Afghanistan sebagai Markas bagi gerakan-gerakan radikal Islam, seperti kelompok teroris Al-Qaeda. Dan hal itu semakin

menyeret kepentingan global, akibat dari gerakan islam yang ada di afghanistan yang dinilai sangat membahayakan Barat atas hegemoni ideologisnya di dunia.

Juga terdapat dalam jurnal yang berjudul '*Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban di Afghanistan (1996-2001)*' karya M. Nur Rokhman dan Ali Ma'ruf, Mahasiswa Universitas Negeri Jogjakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sebagai berikut: (1) Pada masa Taliban menguasai pemerintahan mereka sangat cepat dan mampu mengalahkan pemerintahan yang dijalankan oleh Mujahidin. Pemerintahan Taliban juga memutuskan untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasannya (2) Taliban waktu menjalankan pemerintahan mereka membuat kebijakan sesuai dengan syariah Islam versi mereka sendiri seperti pembatasan perempuan Afghanistan. Perempuan dilarang untuk bekerja serta menempuh pendidikan. Taliban berdalih bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Afghanistan saat itu belum memungkinkan bagi perempuan Afghanistan. (3) Pemerintahan Taliban membuat kebijakan dengan menyerang wilayah utara. Penyerangan wilayah Afghanistan membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya Taliban memutuskan untuk melindungi Osama Bin Laden guna untuk mendapatkan sokongan dana untuk menyerang wilayah utara Afghanistan guna melegitimasi kekuasaannya. (4) Keputusan Taliban untuk melindungi Osama Bin Laden berdampak pada eksistensi pemerintahannya yang kemudian di invasi oleh Amerika Serikat beserta sekutunya. Pada akhirnya Pemerintahan yang selama itu di pegang oleh Taliban dapat digulingkan.

Buku yang ditulis William Maley '*Taliban dan Multi konflik di Afghanistan.*' Terbit di Jakarta Timur oleh Penerbit: Pustaka Al-Kautsar 1999.

Buku ini menerangkan tentang akar-akar sosial dan doktrin Taliban. Mendeskripsikan kekacauan pada masa Mujahidin hingga runtuhnya pemerintahan Mujahidin. Akibat dari kesalahan pemimpin Afghanistan yaitu Presiden Burhannudin Rabbani yang kurang perhatian terhadap kehidupan rakyat yang sangat menderita karena perampokan dan kekerasan serta pemerkosaan terhadap wanita. Kemudian bangkitnya Taliban di Kandahar untuk mengusir para perampok yang bejat tersebut. Buku ini juga menjelaskan tentang hubungan Taliban dengan dunia internasional dan hubungan Taliban dengan Pakistan.²⁹

Hal serupa juga terdapat dalam skripsi yang berjudul '*Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M*' yang ditulis oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) yang bernama Durrotun Nafisah, ditemukan pembahasan, bawasannya perang Taliban di Afghanistan yang berganti nama menjadi *Imarah* Islam Afghanistan.³⁰ Yang mana Imarah Islam Afghanistan sendiri adalah gerakan yang melindungi nilai-nilai serta kepentingan Afghanistan dengan membebaskannya dari penjajahan, teror, korupsi, penjagaan keamanan tanpa meminta bantuan dari dominasi-dominasi kekuatan kelompok luar.

Usai menguasai Afghanistan. Taliban mengonstruksi ulang hukum tersebut dengan dasar syariat Islam versi mereka sendiri dalam artian syariah Islam menurut penafsiran tokoh, pimpinan kelompok taliban. Kelompok militan Islam tersebut menganggap gerakannya adalah sebagai pembaharuan negara Islam. Dan kemudian Taliban terbukti memiliki keterlibatan dengan atau sebagai gerakan teroris. Sampai

²⁹ William Maley, *Taliban Dan Multikonflik Di Afghanistan* (Pustaka Al-Kautsar, 1999).

³⁰ Durrotun Nafisah, '*Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M*', *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

akhirnya peraturan-peraturan yang telah ditegakkan oleh Taliban tidak disukai bahkan ditolak oleh warga Afghanistan dan bahkan juga dikecam oleh dunia internasional karena terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia atas pemberlakuan atau tindakan sewenang-wenangan hukum yang ditetapkan.

1.4.2 Perbandingan Kebijakan Taliban dari Masa ke Masa

Penelitian yang membandingkan kebijakan Taliban di periode pertama dan kedua menjadi penting dalam menganalisis evolusi politik mereka. Peter Mills (2024) dalam karya bukunya *Taliban Governance in Afghanistan*, membahas perubahan yang signifikan dalam kebijakan Taliban setelah kembali berkuasa pada tahun 2021. Dia berargumen bahwa meskipun Taliban masih mempertahankan ideologi dasar yang sama, ada beberapa perbedaan, terutama dalam pendekatan mereka terhadap hubungan internasional dan media. Taliban kedua lebih pragmatis dan berusaha mendapatkan pengakuan internasional, meski masih dihadapkan pada dilema dalam kebijakan gender dan pendidikan.³¹

Sementara itu, Giustozzi (2019) dalam bukunya *The Taliban at War 2001–2021*, menganalisis bagaimana Taliban berevolusi sebagai sebuah gerakan politik dan militer dalam dua dekade terakhir. Giustozzi menyebutkan bahwa strategi dan kebijakan Taliban berubah sebagai respons terhadap tekanan domestik dan internasional, termasuk strategi kontra-terorisme Amerika Serikat dan aliansi NATO di Afghanistan. Perubahan dalam struktur komando dan kebijakan Taliban

³¹ Peter Mills, *Taliban Governance in Afghanistan* (Institute for the Study of War, 2024).

ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam cara mereka mengelola kekuasaan di Afghanistan setelah 2021.³²

Ada juga skripsi yang berjudul ‘*Gerakan Taliban di Afghanistan Tahun 1994-2014 M*’ yang ditulis oleh Fahrani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta³³. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini lebih membahas mengenai gerakan Taliban di Afghanistan dengan rentang waktu 1994 sampai 2014. Dari penelitian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa:

(1) Pembentukan gerakan Taliban diawali dengan niat baik. Terbentuknya gerakan ini merupakan reaksi dari para talib (siswa) madrasah kepada penguasa Afghanistan kala itu. Para penguasa di sekitar saat itu abai terhadap keadaan masyarakat di Afghanistan. (2) Kebangkitan semangat Jihad para talib (siswa) yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar inilah titik awal lahirnya Taliban di Afghanistan, mereka bangkit melawan sisa-sisa pasukan Uni-Soviet yang mengancam masyarakat afghanistan. Kemudian, untuk mengamankan masyarakat dan mengalahkan pemerintahan Burhanuddin Rabbani yang abai terhadap warganya.

Kesimpulan yang ketiga adalah Gerakan Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar dibuat tahun 1994 dan gerakan ini diberi nama Taliban. Kelompok ini didirikan oleh Mullah Omar bersama dengan siswa madrasah yang bingung dengan pemerintahan afghanistan kala itu. Hingga November 1995 Taliban menemukan cara untuk menguasai beberapa wilayah di Afghanistan (4) Pengaruh

³² A Giustozzi, *The Taliban at War 2001–2021* (Oxford University Press, 2019).

³³ Fahrani, ‘*Gerakan Taliban Di Afghanistan Tahun 1994-2014 M*’, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, p. 118.

yang dapat dirasakan dari Taliban yang sangat jelas adalah hancurnya Afghanistan. Namun, di lain sisi Taliban menang dalam hal membawa harmoni dan keamanan bagi warga Afghanistan selama menduduki Pemerintahan. Terlebih, pada abad XXI, setelah hampir 20 tahun lamanya Afghanistan dikuasai oleh kaum Komunis, Taliban mampu membangun sebuah negara yang bergantung pada Syariah Islam, yang menandakan kebangkitan Islam disana.

1.4.3 Studi tentang Taliban Kedua (2021-Sekarang)

Putra dan Kadek Surya Alit Dharma (2022) dalam artikel jurnalnya *Aneksasi Afghanistan terhadap Taliban tahun 2021* mengeksplorasi bagaimana kebijakan Taliban kedua menghadapi tantangan dalam membangun negara di tengah kekhawatiran internasional tentang hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan. Farhat menyatakan bahwa meskipun ada beberapa upaya reformasi untuk menunjukkan keterbukaan, kebijakan Taliban tetap bersifat konservatif, terutama dalam konteks sosial dan hukum.³⁴

Penelitian lain oleh Greame Smith (2024), *Afghanistan Three Years after the Taliban Takeover*³⁵, membahas kesinambungan dan perubahan dalam kebijakan Taliban kedua terkait dengan isu-isu seperti ekonomi, hubungan internasional, dan keamanan domestik. Greame menunjukkan bahwa meskipun Taliban mencoba menyesuaikan diri dengan tuntutan global, mereka masih terikat oleh doktrin

³⁴ Kadek Surya Alit Dharma Putra, 'Aneksasi Afghanistan Terhadap Taliban Tahun 2021', *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4 (2021), p. 924.

³⁵ Graeme Smith, 'Afghanistan Three Years after the Taliban Takeover', *International Crisis Group*, 2024 <<https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-three-years-after-taliban-takeover>>.

ideologi yang kaku, yang menyebabkan tantangan dalam mendapatkan legitimasi global.

Penelitian ini menempati posisi penting dalam kajian mengenai Taliban karena memberikan analisis komparatif lintas periode kekuasaan yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung hanya memfokuskan kajian pada era Taliban pertama (Goodson³⁶, Rashid³⁷, Rokhman³⁸) atau pada konteks sosial-historis pra-Taliban (Al-Ghifari³⁹), maka penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan membandingkan kesamaan dan perubahan kebijakan Taliban pada dua periode kekuasaan: 1996-2001 dan 2021-sekarang. Dengan menggunakan pendekatan *Most Similar System Design (MSSD)*, penelitian ini mampu mengidentifikasi variabel yang konsisten maupun variabel yang mengalami transformasi dalam struktur pemerintahan, kebijakan sosial, dan ideologi Taliban. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademis berupa pemetaan dinamika kontinuitas dan perubahan Taliban yang belum pernah dikaji secara komprehensif sebelumnya.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Goodson Larry P (2001)	Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban	Kualitatif	Menyoroti kebijakan Taliban terkait wanita, pendidikan, dan hukum syariah, serta dampak sanksi internasional. Pemerintahan Taliban pertama sangat

³⁶ P, *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban*.

³⁷ A Rashid, *Taliban Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia* (Yale University Press, 2001).

³⁸ M. Nur Rokhman, 'Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban Di Afghanistan (1996-2001)'.

³⁹ Al-Ghifari Ahda Abid, 'Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)'.

				represif dengan pengaruh internasional yang terbatas.
2.	Rashid (2000)	Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia	Kualitatif	Membahas hubungan Taliban dengan kelompok jihad internasional dan dampaknya terhadap stabilitas regional. Menguraikan legitimasi Taliban berbasis syariah Islam.
3.	Al-Ghifari Ahda Abid (2013)	Dinamika Politik Afghanistan pada Masa Pemerintahan Taliban	Kualitatif	Fokus pada konflik ideologi Islam-Komunis sebelum Taliban, kemunculan Taliban akibat instabilitas politik Mujahidin, dan kebijakan radikal Taliban, termasuk menjadikan Afghanistan markas gerakan radikal seperti Al-Qaeda.
4.	M. Nur Rokhman & Ali Ma'ruf (2015)	Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban di Afghanistan (1996-2001)	Kualitatif	Taliban mendirikan pemerintahan berbasis syariah Islam, kebijakan represif terhadap perempuan, dan kebijakan mendukung Osama bin Laden untuk pendanaan. Keputusan melindungi Bin Laden menjadi penyebab invasi AS.
5.	William Maley (1999)	Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan	Kualitatif	Menjelaskan tentang akar-akar sosial dan doktrin Taliban. Mendeskripsikan kekacauan pada masa Mujahidin hingga runtuhnya pemerintahan Mujahidin. Akibat dari kesalahan pemimpin Afghanistan yaitu Presiden Burhannudin Rabbani yang kurang perhatian terhadap kehidupan rakyat
6.	Durrotun Nafisah (2019)	Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M	Kualitatif	Taliban mengonstruksi ulang hukum berbasis syariah Islam versi mereka. Pemerintahan mereka dikritik atas pelanggaran

				HAM dan tindakan represif, yang menuai kecaman internasional.
7.	Peter Mills (2024)	Taliban Governance in Afghanistan	Kualitatif	Membahas perubahan kebijakan Taliban kedua (2021-sekarang), dengan fokus pada pendekatan pragmatis dalam hubungan internasional, meskipun tetap menghadapi dilema terkait gender dan pendidikan.
8.	Giustozzi (2019)	The Taliban at War 2001–2021	Kualitatif	Analisis evolusi strategi politik dan militer Taliban selama dua dekade terakhir. Menyoroti perubahan struktur komando dan kebijakan mereka sebagai respons terhadap tekanan internasional.
9.	Fahrani (2020)	Gerakan Taliban di Afghanistan Tahun 1994-2014 M	Kualitatif	Mengulas lahirnya Taliban sebagai reaksi terhadap ketidakadilan pemerintahan dan pengaruh Uni Soviet. Taliban berhasil membangun stabilitas berbasis syariah Islam, tetapi juga menghancurkan banyak aspek sosial Afghanistan.
10.	Putra & Kadek Surya Alit Dharma (2022)	Aneksasi Afghanistan terhadap Taliban tahun 2021	Kualitatif	Taliban kedua menghadapi tantangan hak asasi manusia dan pembangunan negara. Kebijakan tetap konservatif, meskipun ada upaya menunjukkan keterbukaan.
11.	Greame Smith (2024)	Afghanistan Three Years after the Taliban Takeover	Kualitatif	Taliban mencoba menyesuaikan kebijakan dengan tuntutan global, terutama ekonomi dan hubungan internasional. Namun, ideologi kaku mereka tetap menjadi hambatan legitimasi di tingkat global.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Perbandingan Politik

Penelitian ini didasarkan atas analisis umum mengenai teori dan konsep yang dipakai untuk mengkaji bagaimana perbandingan dinamika yang terjadi pada saat Taliban membuat kebijakan antara Pemerintahan Taliban pertama dan kedua. Teori perbandingan politik Ronald H. Chilcote sangat relevan dalam menganalisis pola-pola kebijakan Taliban di dua periode pemerintahan yang berbeda. Dengan menekankan pada dimensi struktur kekuasaan, ideologi, dan kebijakan, teori ini memberikan alat analitis yang komprehensif untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan Taliban dari internal dan eksternal memengaruhi dinamika politik Taliban.

Dalam tulisan Ronald H. Chilcote mendefinisikan pengertian perbandingan politik (*Comparative Politics*) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang secara tidak langsung berhubungan dengan pemerintahan (antara lain adalah suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan).⁴⁰ Ronald H. Chilcote juga menjelaskan perbandingan politik sebagai studi yang bertujuan memahami kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, dalam konteks spesifik melalui pendekatan analitis yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya membandingkan institusi atau aktor politik, tetapi juga menelaah dinamika perubahan struktur sosial dan budaya.⁴¹

⁴⁰ Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics, Theories of Comparative Politics* (Westview Press, 2018), doi:10.4324/9780429492686.

⁴¹ *Ibid.* hlm 4.

Dalam konteks penelitian ini, teori perbandingan politik Chilcote menjadi kerangka analitis untuk mengeksplorasi perubahan dan kontinuitas kebijakan Taliban pertama (1996–2001) dan kedua (2021–sekarang). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai bagaimana Taliban memobilisasi kekuasaan, menerapkan ideologi, dan merumuskan kebijakan dalam kondisi politik yang berbeda.

Dalam konteks penelitian ini, tiga aspek analitis yang digunakan merupakan derivasi sistematis dari kerangka teori perbandingan politik yang dikemukakan oleh Ronald H. Chilcote. Aspek-aspek tersebut meliputi:

- A. **Kebijakan:** Respons kebijakan terhadap tekanan domestik (sosial) dan tekanan internasional (diplomasi dan hubungan global).
- B. **Struktur Kekuasaan:** Sentralisasi dan stabilitas internal kekuasaan dalam dua Pemerintahan Taliban.
- C. **Ideologi:** Perubahan atau kontinuitas dalam penerapan ideologi Islam Konservatif.

Setiap variabel dianalisis melalui data historis dan kebijakan yang diterapkan oleh Taliban dalam dua periode kekuasaan mereka. Variabel ini bertujuan untuk memahami pola perubahan dalam dinamika kebijakan Taliban di tengah tekanan internal dan eksternal, serta implikasinya terhadap situasi politik, sosial Afghanistan. Dari tiga dimensi utama yang telah disebutkan maka penjelasan secara komprehensif sebagai berikut:

Dimensi Kebijakan

Ronald H. Chilcote menekankan bahwa pada dimensi kebijakan dalam setiap perbandingan politik mencakup respons pemerintah terhadap tekanan

domestik dan internasional. Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai serangkaian keputusan administratif, tetapi juga sebagai cerminan dari dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu pemerintahan. Dalam konteks Taliban, dimensi kebijakan dapat dilihat melalui cara pemerintahan pertama dan kedua menanggapi tantangan sosial dan tekanan diplomasi global. Pada masa pemerintahan pertama (1996-2001), kebijakan Taliban bersifat isolasionis dengan penekanan pada implementasi syariah yang sangat ketat. Taliban memberlakukan aturan yang ekstrem, seperti melarang perempuan bekerja dan bersekolah, serta menerapkan hukuman fisik yang keras. Kebijakan ini menimbulkan kecemasan internasional dan isolasi diplomatik yang mendalam. Selain itu, Taliban gagal mengelola Afghanistan, yang pada masa itu sangat bergantung pada sektor pertanian dan bantuan internasional. Tidak adanya upaya untuk merangkul komunitas internasional melalui kebijakan yang lebih inklusif membuat pemerintahan pertama terisolasi secara diplomatik.

Berbeda dengan era pertama, pada pemerintahan kedua Taliban (2021–sekarang) menunjukkan perubahan dalam beberapa aspek kebijakan, meskipun tetap mempertahankan sifat konservatifnya. Salah satu kebijakan penting yang menjadi fokus adalah upaya untuk mengelola hubungan internasional secara lebih pragmatis. Taliban mencoba membangun aliansi dengan negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan Pakistan untuk mendapatkan dukungan ekonomi dan diplomatik. Misalnya, Taliban berupaya mengamankan investasi Cina dalam proyek-proyek infrastruktur di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road*

Initiative)⁴². Dalam bidang domestik, Taliban mengupayakan reformasi dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, meskipun pengelolaannya tetap menghadapi tantangan akibat korupsi dan kurangnya profesionalisme administratif.

Namun, kebijakan Taliban di era kedua tetap menuai kritik internasional, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan hak perempuan dan minoritas. Meski Taliban berusaha menunjukkan fleksibilitas dalam diplomasi, kebijakan represif di dalam negeri mencerminkan inkonsistensi dalam pendekatan mereka. Chilcote menjelaskan bahwa dinamika kebijakan semacam ini merupakan hasil dari ketegangan antara tekanan domestik dan kebutuhan untuk bertahan di lingkungan internasional yang kompleks.

Dengan membandingkan kedua periode pemerintahan ini, terlihat bahwa perubahan kebijakan Taliban bukan hanya hasil dari transformasi internal, tetapi juga respons terhadap tekanan eksternal yang semakin besar. Taliban pertama lebih fokus pada legitimasi ideologis tanpa memperhatikan realitas geopolitik, sedangkan Taliban kedua mencoba mengakomodasi dinamika internasional untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti yang diungkapkan Chilcote, kebijakan politik selalu dipengaruhi oleh konteks historis dan lingkungan politik global yang terus berubah, sehingga pola kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintahan dapat menjadi alat untuk memahami adaptasi politik mereka.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Dimensi Struktur Kekuasaan

Ronald H. Chilcote dalam teorinya menekankan pentingnya analisis terhadap struktur kekuasaan sebagai dimensi fundamental dalam memahami dinamika politik suatu Pemerintahan. Pada dimensi ini mengkaji bagaimana kekuasaan dibentuk, didistribusikan, dan dijalankan dalam sebuah pemerintahan. Struktur kekuasaan tidak hanya mencakup hierarki formal dalam institusi pemerintahan, tetapi juga relasi antara aktor-aktor politik utama, baik di tingkat domestik maupun internasional, yang membentuk landasan pemerintahan. Dalam konteks Taliban, analisis struktur kekuasaan pada era pertama (1996–2001) dan kedua (2021–sekarang) menunjukkan perbedaan signifikan dalam konfigurasi kekuasaan mereka.

Pada Era pertama, struktur kekuasaan Taliban sangat terpusat di bawah pimpinan Mullah Mohammad Omar, pendiri dan pemimpin tertinggi Taliban. Mullah Omar memerintah dengan gaya kepemimpinan yang berbasis pada karisma dan otoritas religius. Kandahar, yang menjadi pusat kekuasaan Taliban, berfungsi sebagai jantung dari pengambilan keputusan politik dan militer. Struktur kekuasaan bersifat hierarkis dengan dominasi penuh oleh para ulama dan tokoh Pashtun⁴⁴. Kekuasaan ini dijalankan tanpa ada mekanisme formal yang kuat untuk distribusi kekuasaan kepada wilayah-wilayah lain, sehingga menimbulkan ketergantungan tinggi pada otoritas pusat. Struktur ini memperlihatkan pola pemerintahan yang

⁴⁴ A Khalid, 'Taliban Politics', *A Comparative Study of Taliban and Other Afghan Political Groups*, J. Peace Res., 2015, pp. 8(1), 23-45. <<https://www.jstor.org>>.

tertutup dan minim interaksi dengan aktor internasional, yang berujung pada isolasi diplomatik dan lemahnya legitimasi di tingkat global.⁴⁵

Berbeda dengan Era pertama, Era kedua Taliban menunjukkan kompleksitas struktur kekuasaan yang lebih besar. Setelah kembali berkuasa pada tahun 2021, Taliban membangun struktur kekuasaan yang lebih berlapis, dengan pemimpin tertinggi, Hibatullah Akhundzada, tetap memegang otoritas utama. Namun, pusat kekuasaan tidak lagi hanya berada di tangan individu tertentu, melainkan tersebar di antara beberapa faksi utama, seperti kelompok Haqqani yang dipimpin oleh Sirajuddin Haqqani dan faksi Mohammad Yaqoob. Ketegangan antar faksi ini menggambarkan dinamika internal yang lebih plural dibandingkan Era pertama. Selain itu, Taliban kini berusaha meningkatkan kontrol administratif melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih terorganisir, meskipun banyak yang tetap didasarkan pada interpretasi agama mereka yang konservatif.⁴⁶

Pada tingkat internasional, struktur kekuasaan Taliban di Era kedua menunjukkan pergeseran strategi. Tidak seperti Era pertama yang mengabaikan diplomasi internasional, Era kedua lebih pragmatis dengan mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan Pakistan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan internasional tetapi juga untuk memperkuat legitimasi domestik mereka melalui dukungan ekonomi dan politik dari negara-negara tersebut. Ronald H. Chilcote berpendapat bahwa perubahan dalam struktur kekuasaan sering kali merupakan refleksi dari upaya

⁴⁵ Rashid, *Taliban Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*.

⁴⁶ Milan Hauner and Barnett R. Rubin, 'The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System.', *Pacific Affairs*, 69.2 (1996), p. 253, doi:10.2307/2760728.

adaptasi terhadap tekanan eksternal, terutama dalam konteks globalisasi dan dinamika geopolitik yang kompleks.

Dimensi Ideologi

Dimensi ideologi, sebagaimana dijelaskan Ronald H. Chilcote dalam analisis perbandingan politiknya, merupakan elemen esensial untuk memahami bagaimana sebuah Pemerintahan memobilisasi kekuasaan, membentuk legitimasi, dan mengarahkan kebijakannya. Ideologi tidak hanya menjadi kerangka nilai yang mendasari perilaku politik suatu pemerintahan, tetapi juga menjadi alat mobilisasi massa dan penguat identitas politik suatu kelompok.⁴⁷ Dalam konteks Taliban, ideologi menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun otoritas mereka, baik pada Era pertama (1996–2001) maupun Era kedua (2021–sekarang). Namun, terdapat dinamika yang menarik dalam penerapan ideologi antara kedua periode kekuasaan tersebut.

Pada Era pertama, ideologi Taliban berakar kuat pada interpretasi ultra-konservatif terhadap syariat Islam, yang dipengaruhi oleh madzhab Deobandi dari India. Deobandi adalah aliran teologi Islam ortodoks yang menekankan kepatuhan ketat terhadap hukum Islam, dengan penolakan terhadap modernisasi Barat. Taliban menerapkan interpretasi ini dengan sangat ketat, terutama terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan mereka, seperti pelarangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, larangan terhadap musik dan hiburan, serta pemberlakuan hukum syariat dengan sanksi yang sangat keras, seperti amputasi dan eksekusi publik. Ideologi ini tidak hanya menjadi dasar

⁴⁷ Chilcote, *Theor. Comp. Polit.* Chilcote, *Theor. Comp. Polit.*

kebijakan, tetapi juga alat kontrol sosial yang menanamkan ketakutan di masyarakat. Ronald H. Chilcote mencatat bahwa ideologi yang terlalu kaku sering kali digunakan oleh pemerintahan otoriter untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun hal itu dapat mengalienasi masyarakat dan komunitas internasional.⁴⁸

Namun, pada Era kedua, Taliban menunjukkan tanda-tanda adaptasi ideologi, meskipun tetap mempertahankan inti pandangan konservatif mereka. Dalam beberapa aspek, Era kedua mencoba menampilkan wajah yang lebih moderat untuk mendapatkan legitimasi di tingkat internasional. Misalnya, meskipun mereka tetap melarang pendidikan bagi sebagian besar perempuan, mereka membuat beberapa pengecualian terbatas untuk pelatihan di bidang kesehatan dan pendidikan dasar di beberapa wilayah. Selain itu, Taliban mulai menggunakan narasi ideologis yang lebih pragmatis, seperti menekankan pentingnya kedaulatan Afghanistan dari campur tangan asing, yang beresonansi dengan masyarakat lokal yang lelah dengan pendudukan asing selama dua dekade sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi Taliban tidak lagi sepenuhnya bersifat dogmatis, melainkan juga dipengaruhi oleh kebutuhan politik dan ekonomi yang lebih luas. Chilcote berpendapat bahwa ideologi, dalam konteks ini, menjadi alat fleksibel yang dapat disesuaikan untuk merespons tekanan domestik dan internasional.

Selain itu, dimensi ideologi Taliban di Era kedua juga terlihat dalam upaya mereka membangun hubungan pragmatis dengan negara-negara seperti Cina dan Rusia. Taliban menggunakan narasi Islam yang konservatif sebagai simbol identitas

⁴⁸ *Ibid.* hlm 242.

nasional, tetapi mereka juga menghindari ideologisasi ekstrem yang dapat menghalangi hubungan dengan negara-negara yang tidak berbasis Islam. Pendekatan ini mencerminkan strategi Taliban untuk menggunakan ideologi sebagai alat diplomasi, sejalan dengan pandangan Chilcote bahwa ideologi sering digunakan oleh pemerintahan untuk memperluas pengaruh mereka di kancah internasional tanpa harus sepenuhnya mengorbankan nilai-nilai inti mereka.⁴⁹

Dengan membandingkan kedua Pemerintahan ini, terlihat bahwa ideologi Taliban tetap menjadi landasan kebijakan mereka, tetapi penerapannya mengalami pergeseran dari rigiditas yang ekstrem menuju fleksibilitas yang lebih pragmatis. Pergeseran ini menunjukkan bahwa ideologi dalam konteks politik tidak hanya bersifat statis, tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman. Seperti yang ditegaskan Chilcote, ideologi dalam politik selalu berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan menghadapi tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kerangka teori yang digunakan dalam studi ini, yakni teori perbandingan politik Ronald H. Chilcote, menyediakan alat analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika pemerintahan Taliban dalam dua periode kekuasaan yang berbeda. Teori ini memfokuskan pada tiga dimensi utama: struktur kekuasaan, ideologi, dan kebijakan yang saling berkaitan dalam membentuk pola pemerintahan sebuah rezim. dimensi kebijakan menunjukkan pergeseran dari kebijakan domestik yang ekstrem dan isolasi internasional pada Era pertama ke arah pragmatisme dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi pada Era kedua, meskipun mereka tetap

⁴⁹ *Ibid.*

mempertahankan sejumlah kebijakan sosial yang keras. Dimensi ideologi mengungkapkan transformasi Taliban dari pendekatan ideologi konservatif yang ketat pada Era pertama menuju fleksibilitas ideologis yang lebih besar pada Era kedua, terutama dalam menghadapi tekanan geopolitik. Sementara itu, Pada dimensi struktur kekuasaan, teori ini membantu mengidentifikasi perbedaan antara pendekatan otoritarian yang terpusat pada Era Taliban pertama (1996–2001) dan upaya desentralisasi yang lebih pragmatis pada Era kedua (2021–sekarang), sebagai respons terhadap tantangan internal dan eksternal.

Variabel-variabel yang dikaji dalam kerangka teori ini meliputi dinamika kekuasaan di internal Taliban, ideologi sebagai alat legitimasi politik, dan respons kebijakan terhadap konteks internasional. Analisis terhadap variabel-variabel ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Taliban beradaptasi dengan perubahan situasi domestik dan global untuk mempertahankan kontrol politik. Teori Ronald H. Chilcote juga menekankan bahwa struktur kekuasaan, ideologi, dan kebijakan tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan sebagai elemen yang saling memengaruhi dalam membentuk strategi pemerintahan. Dengan demikian, kerangka teori ini relevan tidak hanya untuk menganalisis perbedaan antara dua Era Taliban, tetapi juga untuk memahami bagaimana perubahan konteks global memengaruhi dinamika internal mereka.

Keseluruhan kerangka teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menjelaskan kontinuitas dan perubahan dalam strategi politik Taliban.

Sebagaimana ditegaskan Ronald H. Chilcote⁵⁰, "Studi perbandingan politik memungkinkan kita untuk memahami hubungan kompleks antara kekuasaan, ideologi, dan kebijakan dalam membentuk rezim politik." Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi transformasi pada kedua periode pemerintahan Taliban, tetapi juga menawarkan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana rezim-rezim politik dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan lintas waktu.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai mekanisme ilmiah yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dan informasi guna tujuan atau kepentingan yang bersifat spesifik. Menurut Mochtar Mas'ood metodologi adalah prosedur yang dipakai dalam mendiskripsikan dan meramalkan fenomena.⁵¹ Metodologi penelitian memiliki peran penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian dapat mempermudah dalam memberikan jawaban terhadap masalah atau isu yang sedang diselidiki sehingga penulis dapat menghasilkan penelitian yang benar dan akurat serta memberikan gambaran kesimpulan kajian masalah tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk konsistensi dan transformasi yang terjadi pada pemerintahan Taliban antara Era pertama (1996–2001) dan Era kedua (2021–sekarang)?, maka peneliti

⁵⁰ Chilcote, *Theor. Comp. Polit. Theories of Comparative Politics, Theories of Comparative Politics* (Boulder: Westview Press, 2018) <<https://doi.org/10.4324/9780429492686>>.

⁵¹ Mohtar Mas'ood, 'Metodologi', in *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990), p. 76 <http://103.44.149.34/elib/assets/buku/ILMU_HUBUNGAN_INTERNASIONAL1.pdf>.

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, khususnya *Most Similar System Design* (MSSD). Pendekatan ini diterapkan untuk membandingkan dua sistem yang memiliki banyak kesamaan, tetapi menunjukkan perbedaan dalam variabel tertentu yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, penelitian membandingkan pemerintahan Taliban pada periode pertama (1996–2001) dan periode kedua (2021–sekarang). Kedua periode ini memiliki banyak kesamaan dalam struktur politik, ideologi, dan aktor utama, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam kebijakan yang diterapkan, terutama dalam aspek kebijakan sosial, hak perempuan, dan hubungan internasional.

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ruang penelitian dalam batas materi dan batas waktu penelitian. Adapun tujuannya adalah agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian yang sudah ditetapkan dan tidak melampaui jangka waktu yang sudah ditentukan.

Batasan Materi

Penelitian ini dibatasi pada analisis kebijakan yang diimplementasikan oleh Era Taliban selama dua periode kekuasaannya, yaitu Era pertama (1996-2001) dan Era kedua (2021-sekarang). Batasan materi dalam penelitian ini mencakup kebijakan-kebijakan kunci di bidang politik, sosial, pendidikan, dan hak asasi manusia. Secara spesifik, penelitian ini akan membahas kebijakan pendidikan, terutama akses terhadap pendidikan bagi perempuan, kebijakan sosial yang mengatur masyarakat afghanistan dan hubungan internasional, serta kebijakan hak asasi manusia yang menyangkut kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan, dan

minoritas. Penelitian ini juga membatasi cakupannya pada operasi militer maupun strategi militer dengan negara-negara yang sedang berperang dengan Negara Afghanistan dan dinamika hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina.

Batasan materi ini tidak mencakup aspek teknis dari strategi militer atau operasi militer Taliban secara mendalam, meskipun stabilitas internal dan keamanan yang dihasilkan oleh kebijakan pertahanan tetap menjadi bagian dari analisis. Selain itu, penelitian tidak akan mendalami latar belakang sejarah Taliban sebelum tahun 1996, karena fokus utama adalah pada perbandingan kebijakan antara dua periode kekuasaan Taliban.

Batasan Waktu Penelitian

Adapun batasan waktu, penelitian ini mencakup periode kekuasaan Taliban yang pertama, yaitu dari tahun 1996 hingga 2001, serta periode kedua, yaitu dari 2021 hingga 2024. Tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir karena penelitian ini disusun dengan mengacu pada data dan perkembangan terbaru hingga periode tersebut. Kebijakan yang diterapkan Taliban setelah tahun 2025 tidak akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan batasan waktu ini, penelitian akan menganalisis perubahan kebijakan di dua periode secara mendalam dan menyeluruh tanpa memperluas cakupan ke perkembangan kebijakan masa depan yang belum dapat terukur dampaknya.

Melalui batasan materi dan waktu ini, penelitian bertujuan untuk menjaga fokus analisis agar tetap relevan dengan tujuan utama, yaitu perbandingan antara kebijakan yang diterapkan Taliban pada kedua Era tersebut, sehingga hasil

penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif terkait dinamika kebijakan Taliban dari masa ke masa.

Teknik pengambilan Dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder dan studi literatur kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada dinamika kebijakan Taliban yang memerlukan analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan pada dua periode kekuasaan mereka, yaitu Era pertama (1996-2001) dan Era kedua (2021-sekarang). Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai sumber resmi dan tidak resmi yang tersedia, serta literatur yang relevan dalam memahami konteks kebijakan yang diterapkan oleh Taliban.

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen, laporan, artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, serta data dari organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki relevansi dengan kebijakan Taliban. Laporan dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) akan menjadi referensi penting dalam memahami perubahan kebijakan terkait hak asasi manusia, hak perempuan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, artikel-artikel dari media kredibel dan analisis dari think tank internasional juga akan digunakan untuk melacak dinamika kebijakan luar negeri dan diplomasi Taliban.

Literatur kepustakaan yang digunakan meliputi studi-studi terdahulu yang membahas kebijakan Taliban pada dua Era mereka. Buku dan artikel dari peneliti-peneliti terkemuka seperti Ahmed Rashid dan Barnett Rubin akan dijadikan rujukan dalam memahami konteks sejarah dan politik di balik kebijakan Taliban. Penelitian ini juga memanfaatkan data dari berbagai studi akademis yang mengkaji kebijakan sosial, politik, dan pendidikan di Afghanistan selama periode Taliban. Analisis komparatif antara kebijakan Taliban pada kedua periode ini akan didukung oleh studi literatur yang relevan dari perspektif kebijakan politik dan internasional.

Dengan teknik pengambilan dan analisis data ini, penelitian dapat mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber informasi yang valid dan kredibel untuk membangun argumen dan kesimpulan yang solid terkait perbandingan kebijakan Taliban dari masa ke masa. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan atau kesinambungan kebijakan Taliban, serta faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut. Fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber analisis akan dijadikan fokus kajian yang diangkat peneliti. Miles dan Huberman dalam analisis kualitatif mengatakan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.⁵² Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah :

1. Reduksi Data

⁵² A. M Miles, M. B., & Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE Publications Inc., 1994).

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion/Verification

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada.

1.7 Argumen Pokok

Penelitian ini berargumen bahwa terdapat kesinambungan yang signifikan dalam kebijakan Taliban di berbagai bidang, antara Era pertama (1996–2001) dan Era kedua (2021–sekarang) sebagai respons terhadap dinamika domestik dan tekanan internasional. Pada Era pertama, Taliban menerapkan kebijakan yang sangat represif dan berbasis interpretasi ketat terhadap syariah Islam, terutama dalam aspek sosial dan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan ketat terhadap perempuan, penegakan hukum Islam dengan hukuman fisik ekstrem, serta pendekatan isolasionis dalam hubungan internasional. Konsekuensinya, Taliban kehilangan legitimasi global, menghadapi sanksi ekonomi, dan akhirnya tumbang akibat intervensi militer Amerika Serikat dan sekutunya pada tahun 2001.

Sebaliknya, ketika kembali berkuasa pada tahun 2021, Taliban menghadapi lanskap politik yang berbeda dan menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam beberapa aspek pemerintahan. Meskipun masih mempertahankan kebijakan konservatif dalam hukum Islam dan hak perempuan, mereka mulai berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Cina dan Rusia serta mengelola kebijakan ekonomi dengan lebih terstruktur. Berbeda dengan periode pertama yang didominasi oleh tindakan koersif, Taliban pada periode kedua lebih memperhitungkan kepentingan geopolitik dan tekanan internasional untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, perubahan ini bersifat terbatas dan masih dipengaruhi oleh ideologi dasar Taliban, yang tetap menempatkan interpretasi syariah sebagai dasar kebijakan mereka.

Kedua Era Taliban memiliki kesamaan dalam memusatkan kekuasaan pada pemimpin spiritual, menerapkan syariat Islam konservatif sebagai landasan ideologi, dan mengadopsi kebijakan sosial yang represif. Pembatasan hak perempuan dan kontrol ketat terhadap kebebasan individu tetap menjadi ciri utama. Era pertama bersifat isolasionis, menolak keterlibatan internasional, dan hanya berfokus pada penerapan hukum syariah berdasarkan interpretasi mereka sendiri. Sebaliknya, Era kedua mulai menunjukkan perubahan strategi politik dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap hubungan internasional, meskipun tetap menghadapi kritik keras akibat kebijakan domestik yang represif.

Meskipun pembatasan hak tetap dominan di kedua Era, terdapat sedikit pergeseran pada Era kedua. Pada Era pertama, larangan terhadap perempuan diterapkan secara absolut tanpa pengecualian. Namun, pada Era kedua, terdapat beberapa kelonggaran terbatas, seperti akses pendidikan dasar untuk perempuan di wilayah tertentu, meskipun hal ini

sangat terbatas dan tidak konsisten. Struktur kekuasaan juga mengalami perubahan, di mana Era kedua menunjukkan dinamika internal yang lebih kompleks dengan adanya pluralitas faksi.

Dengan membandingkan kedua Era ini, penelitian ini berupaya menunjukkan adanya pergeseran dalam pola kebijakan Taliban, dari pendekatan yang semata-mata ideologis dan represif menuju strategi yang lebih pragmatis namun tetap problematik. Perubahan ini mencerminkan adaptasi Taliban terhadap tekanan domestik dan internasional, meskipun karakter ideologis kelompok ini tetap memengaruhi setiap kebijakan yang diambil. Maka dari itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dinamika kebijakan Taliban dalam pemerintahan mereka di Afghanistan.

Dengan demikian, Argumen Pokok dari penelitian ini adalah bahwa terdapat kesinambungan yang signifikan dalam kebijakan Taliban di berbagai bidang, meskipun ada upaya untuk menampilkan citra yang lebih moderat di mata dunia. Penelitian ini akan menguji Argumen Pokok ini dengan membandingkan berbagai kebijakan kunci pada kedua periode pemerintahan Taliban dan melihat apakah perubahan yang terjadi hanyalah bersifat kosmetik atau terdapat perubahan substansial yang mengindikasikan pergeseran ideologi dan strategi pemerintahan mereka.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.6 Metode Penelitian 1.7 Argumen Pokok
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEKUATAN POLITIK TALIBAN DI AFGHANISTAN	2.1 Latar Belakang Gerakan Taliban 2.2 Kondisi Politik Afghanistan Sebelum Munculnya Taliban 2.3 Fundamentalisme Deobandi dalam Akar Ideologis Taliban 2.4 Proksi Strategis Pakistan dalam Kemenangan Taliban 2.5 Taliban 1.0 : Negara Teokratik yang Mengisolasi Diri (1996-2001) 2.5.1 Represi Sosial dalam Kebijakan Domestik Taliban Pertama 2.5.2 Isolanisme dalam Hubungan Luar Negeri Era Pertama 2.6 Transisi Kekuasaan : Taliban di Tengah Fragmentasi Afghanistan 2.6.1 Gerakan Perlawanan dan Reorganisasi Pasca 2001 2.6.2 Perang Bayangan dan Rivalitas Antar-Kelompok 2.7 Taliban 2.0 : Kembalinya Rezim Otoritarian dalam Format Baru 2.7.1 Faktor Internasional dan Lokal dalam Kebangkitan Taliban Kedua 2.7.2 Reposisi Taliban dalam Tatanan Politik Global

<p>BAB 3</p> <p>KONSISTENSI TALIBAN 1.0 DAN 2.0</p>	<p>3.1 Ideologi : Akar Deobandi sebagai Basis Ideologi di Dua Era</p> <p>3.2 Struktur Kekuasaan : Konsentrasi Otoritas dan Dominasi Elit Religius</p> <p>3.2.1 Sentralisasi Kekuasaan di Tangan Pemimpin Spiritual</p> <p>3.2.2 Minimnya Partisipasi Politik dan Representasi Publik</p> <p>3.3 Kebijakan : Pola Otoritarian dalam Pemerintahan Taliban</p> <p>3.3.1 Deskriminasi Struktural terhadap Perempuan</p> <p>3.3.2 Implementasi Rigid terhadap Hukum Syariah</p> <p>3.3.3 Penyeragaman Moralitas Sosial di Ruang Publik</p> <p>3.3.4 Cengkraman Informasi : Kontrol Media dan Literasi Publik</p> <p>3.4 Jaringan Kekerasan Transnasional : Dukungan terhadap Kelompok Teroris</p>
<p>BAB 4</p> <p>TRANSFORMASI TALIBAN DARI ERA PERTAMA KE ERA KEDUA</p>	<p>4.1 Kebijakan : Isolasionisme Menuju Pragmatisme</p> <p>4.2 Relasi Utilitarian dengan Negara Sekitar</p> <p>4.3 Perjuangan Menuju Pengakuan Internasional</p> <p>4.4 Ambivalensi Ideologi dan Pragmatisme</p> <p>4.5 Konsistensi dan Transformasi Pragmatis Taliban 1.0 dan 2.0</p>
<p>KESIMPULAN</p>	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>